

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1. Latar Belakang**

Pada kehidupan bernegara tidak terlepas dari tantangan yang harus dihadapi. Begitu juga dengan Negara Indonesia yang dihadapkan pula oleh beberapa tantangan, seperti kemiskinan, kesehatan, korupsi, kesenjangan, serta sumber daya berkelanjutan. Untuk membantu mengatasi tantangan yang ada diperlukan pelaku kegiatan ekonomi yang saling bersinergi antara Rumah Tangga Keluarga (Konsumen), Perusahaan (Produsen), Pemerintah, dan Luar Negeri. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masuk ke dalam Sistem Perekonomian Nasional sebagai pelaku kegiatan ekonomi. Berdasar pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2003), "Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan".

BUMN didirikan untuk ikut serta dalam penyelenggaraan ekonomi Nasional yang di mana memberikan kontribusi terhadap kemajuan perekonomian Nasional dan memberikan kontribusi terhadap penerimaan negara yang diperoleh dari pajak, dividen, serta privatisasi yang dijelaskan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (2003). Kemudian, adanya BUMN dapat menyediakan barang atau jasa guna memenuhi kehidupan masyarakat Indonesia, menjadi instansi pelopor yang menjalankan kegiatan usaha yang belum dijalankan oleh pihak swasta ataupun koperasi, dan memberikan dukungan dan tuntunan kepada pelaku usaha kecil, masyarakat, serta koperasi. Perusahaan BUMN perlu memiliki kinerja yang efektif dan efisien baik dari segi operasional maupun keuangan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah dijelaskan di atas. Baik atau buruk kinerja dari sebuah perusahaan dapat dilihat melalui laba atau profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan BUMN. Profitabilitas adalah laba yang diperoleh perusahaan atas kegiatan penjualan ataupun investasi yang telah dilakukan secara efektif oleh manajemen perusahaan

(Fahmi, 2020 hlm. 68). Tingginya perolehan profit sebuah perusahaan, maka investor melihat perusahaan memiliki kemungkinan kinerja yang baik di masa mendatang.

Tahun 2020 merupakan salah satu tahun terberat yang harus di hadapi oleh sejumlah perusahaan BUMN dikarenakan adanya Pandemi Covid-19. Pandemi ini mempengaruhi penjualan dan pendapatan perusahaan BUMN, sehingga berpengaruh pada perolehan laba bersih yang dicatatkan dan mengganggu tugas BUMN sebagai agen pembangunan dan pencipta nilai pada perekonomian Indonesia (Kementerian Keuangan, 2020). Tahun 2020 Kementerian BUMN mencatatkan penurunan laba bersih menjadi 41 Triliun di mana pada tahun 2019 berhasil mencatatkan laba bersih sebesar 168 Triliun. Penurunan laba bersih disebabkan oleh sejumlah perusahaan BUMN yang mengalami peningkatan pada kewajiban usaha, seperti turunnya pola konsumsi masyarakat dikarenakan adanya pandemi yang mempengaruhi peningkatan simpanan nasabah di sektor perbankan dalam bentuk dana pihak ketiga dan kewajiban non-usaha, seperti meningkatnya sewa guna usaha sehubungan dengan pelaksanaan PSAK 73 yang menyebabkan kapitalisasi aset dan kewajiban sewa guna usaha (Kementerian BUMN, 2020).

Salah satu contoh sektor usaha BUMN yang terdampak cukup besar karena adanya pandemi ini adalah sektor infrastruktur. Berikut merupakan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur Tahun 2019-2020:

Tabel 1. Laba Bersih Perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur Tahun 2019-2020

No	Nama Perusahaan	2019	2020	Naik (Turun)
1	PT Wijaya Karya Tbk	2.621.015.140	322.342.513	(2.298.672.627)
2	PT Jasa Marga Tbk	2.073.888	(41.629)	(2.115.517)
3	PT Waskita Karya Tbk	1.028.898.367.891	(9.495.726.146.546)	(10.524.624.514.437)
4	PT Semen Indonesia Tbk	2.371.233	2.674.343	303.110
5	PT Semen Baturaja Tbk	30.073.855	10.981.673	(19.092.182)
6	PT Adhi Karya Tbk	665.048.421.529	23.702.652.447	(641.345.769.082)
7	PT Pembangunan Perumahan Tbk	1.048.153.079.883	266.269.870.851	(781.883.209.032)

No	Nama Perusahaan	2019	2020	Naik (Turun)
8	PT Utama Karya	2.022.594	(2.060.793)	(4.083.387)
9	Perum Perumnas	(642.991.764.267)	(415.522.832.702)	227.468.931.565
10	PT Brantas Abipraya	282.625	33.657	(248.968)

Sumber: Laporan Keuangan 2019 dan 2020

Tabel 1. menunjukkan bahwa dari 10 perusahaan yang bergerak di Sektor Infrastruktur 8 diantaranya mengalami penurunan pada laba bersihnya, seperti PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Waskita Karya, PT Semen Baturaja Tbk, PT Adhi Karya Tbk, PT Pembangunan Perumahan Tbk, PT Utama Karya, dan PT Brantas Abipraya. Di tengah berlangsungnya kegiatan pembangunan infrastruktur guna mempercepat laju perekonomian Nasional yang dilakukan oleh beberapa perusahaan tersebut, pandemi Covid-19 membuat aktivitas bisnis relatif berhenti dikarenakan adanya pembatasan mobilitas barang dan manusia yang pada akhirnya berdampak kepada turunnya pendapatan serta laba bersih yang membuat beberapa perusahaan mengalami kerugian yang cukup signifikan. Selain adanya Covid-19, turunnya kinerja dari perusahaan BUMN Sektor Infrastruktur ini disebabkan oleh belum dibayarnya piutang dari pihak ketiga yang membebani arus kas perusahaan dan meningkatnya utang perusahaan. Dengan utang yang meningkat serta pendapatan yang menurun membuat perusahaan kesulitan untuk melunasi utang jangka pendeknya (Mulyana, 2021).

Untuk menghasilkan keuntungan atau profit yang maksimal, maka perlu diperhatikan dengan cermat likuiditas perusahaan. Likuiditas termasuk salah satu hal dasar yang sering di lihat oleh investor sebagai bentuk analisis awal pada sebuah perusahaan. Saat perusahaan tidak mampu melunasi kewajiban yang dimilikinya hal tersebut membuat perusahaan perlu menjual aset yang dimiliki dengan harga dibawah pasar dan kondisi terburuknya perusahaan akan mengalami kebangkrutan (Subramanyam, 2017 hlm. 141). Solvabilitas (*leverage*) juga merupakan sebuah hal dasar yang penting untuk tahap analisis awal pada sebuah perusahaan. Solvabilitas (*leverage*) merupakan tingkat keterampilan perusahaan saat mengelola dan melunasi kewajibannya dengan membayar kewajiban secara tepat waktu (Fahmi, 2020 hlm. 87). Pihak manajemen perusahaan harus mampu

Lucky Monic Sabatini, 2021

**DETERMINAN RASIO KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

menjaga *leverage* untuk meningkatkan kepercayaan kreditor bahwa perusahaan mampu mengelola pendanaan perusahaan secara efektif dan efisien. Utang dapat digunakan untuk membantu mengembangkan kegiatan bisnis dan memenuhi kebutuhan operasional perusahaan (Maulana & Safa, 2017).

Selain di lihat melalui segi keuangannya, perlu diperhatikan pula dari segi pengelolaan internal perusahaan yang biasa dikenal dengan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance / GCG*). Penerapan GCG membuat manajemen perusahaan dapat memaksimalkan perannya untuk menciptakan nilai yang maksimal bagi investor serta meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan cara yang efektif dan efisien (Solekhah & Efendi, 2020). Dewan komisaris dan dewan direksi mempunyai peran penting pada keberhasilan penerapan GCG. Dewan komisaris berperan untuk mengawasi kinerja dan memberikan masukan terhadap dewan direksi perusahaan (Effendi, 2020 hlm. 26). Sedangkan, dewan direksi merupakan perangkat perusahaan yang setiap harinya menjalankan kegiatan operasional perusahaan (Hendratni et al., 2018). Namun, pada sejumlah perusahaan BUMN kadang dijumpai dewan komisaris yang melakukan rangkap jabatan, seperti Kartika Wirjoatmodjo merangkap menjadi Komisaris Utama Bank BRI dan Wakil Menteri BUMN serta Ari Kuncoro merangkap sebagai Rektor Universitas Indonesia dan Komisaris Bank BRI yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatan komisaris. Masalah rangkap jabatan ini memiliki kemungkinan untuk berlawanan terhadap perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 25 Tahun 2009 mengenai Pelayanan Publik Pasal 17, UU No. 19 Tahun 2003 mengenai BUMN Pasal 33, dan UU No. 5 Tahun 1999 mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 26 (Indonesia Corruption Watch, 2021).

Selain itu, terdapat juga dewan direksi pada perusahaan BUMN yang terlibat dalam kasus korupsi, sehingga merugikan perusahaan yang membuat tingkat kepercayaan investor menurun dan membuat perusahaan tidak dapat menghasilkan profit yang maksimal. Sebagai contoh Desi Arryani mantan Direktur Utama PT Jasa Marga Tbk yang terlibat kasus penunjukkan perusahaan sub kontraktor untuk melakukan proyek fiktif saat menjabat sebagai Kepala Divisi III di PT Waskita Karya Tbk serta Emirsyah Satar mantan Direktur Utama PT

Garuda Indonesia Tbk yang terlibat kasus suap pengadaan pesawat dan mesin pesawat (Hikam, 2020). Adanya pelanggaran yang dilakukan dewan komisaris serta dewan direksi, maka diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen. Komisaris independen yaitu pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pihak internal perusahaan atau kegiatan bisnis yang dijalankan perusahaan, sehingga tugas yang dijalankan dapat dilakukan dengan efektif dan efisien (Rahmatika et al., 2019). Ditemukan praktik untuk memperkaya diri sendiri yang umumnya dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan cara meningkatkan utang perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, sehingga diperlukan komisaris independen untuk meminimalisir hal tersebut. Praktik tersebut dapat meningkatkan *leverage* dan menurunkan likuiditas, sehingga berpengaruh kepada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Disamping itu terdapat pula komite audit yang bertugas sebagai perantara manajemen perusahaan, auditor internal, dan eksternal selaku penyelenggara dengan direksi dan dewan komisaris selaku pengawas (Effendi, 2020 hlm. 59). Pengawasan yang dilakukan oleh komite audit dapat mengurangi manipulasi atas laporan keuangan yang sengaja dilakukan oleh manajemen perusahaan (Rahmatika et al., 2019).

Penelitian yang dilakukan Wahyuni & K.H. (2018) dengan judul "Analisis Likuiditas, Solvabilitas, dan Aktivitas Perusahaan Terhadap Profitabilitas Pada Perusahaan Manufaktur" diketahui bahwa profitabilitas dipengaruhi positif oleh likuiditas. Dinyatakan bahwa ketika tingginya likuiditas perusahaan, maka perusahaan mampu untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya serta dapat menghasilkan profit yang tinggi. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Sari & Purwohandoko (2019) dengan judul "Pengaruh Modal Kerja, *Leverage*, Likuiditas, dan *Firm Size* Terhadap Profitabilitas Sektor Industri Barang dan Konsumsi" diketahui bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh likuiditas.

Penelitian yang dilakukan Sari & Purwohandoko (2019) dengan judul "Pengaruh Modal Kerja, *Leverage*, Likuiditas, dan *Firm Size* Terhadap Profitabilitas Sektor Industri Barang dan Konsumsi" diketahui bahwa profitabilitas dipengaruhi negatif oleh *leverage*. Perusahaan yang memiliki utang

dengan nilai yang tinggi dapat mengakibatkan besaran beban bunga yang selalu bertambah, sehingga dapat mengurangi keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Nugraheni (2019) dengan judul "Determinan Profitabilitas: Kajian Pengelolaan Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia" diketahui bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh *leverage*.

Penelitian yang dilakukan Azmy et al. (2019) yang berjudul "*Effect of Good Corporate Governance On Company Profitability RE & Property Sector in Indonesia*" dan Islami (2018) yang berjudul "Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Perusahaan" diketahui bahwa profitabilitas dipengaruhi positif oleh komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit. Dinyatakan bahwa saat dewan komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit dimiliki dalam jumlah yang besar, maka dapat mengurangi adanya tumpah tindih tanggungjawab dalam menjalankan tugas serta pengendalian perusahaan dapat dilakukan dengan maksimal. Namun, penelitian tersebut tidak selaras dengan penelitian Subiyanti & Zannati (2019) yang berjudul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Profitabilitas Kinerja Perbankan", Lestari et al. (2020) dengan judul "Pengaruh *Good Corporate Governance* Terhadap Kinerja Keuangan Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI", dan Fitriyani (2021) dengan judul "Pengaruh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, dan Komite Audit Terhadap Profitabilitas Perbankan di BEI Tahun 2017-2019" diketahui bahwa profitabilitas tidak dipengaruhi oleh komisaris independen, dewan direksi, dan komite audit.

Berlandaskan penelitian yang telah ditemui sebelumnya didapatkan hasil yang beragam antara penelitian yang satu dengan lainnya. Dari fenomena yang ada ditemukan *gap search* pada penelitian ini. Berdasarkan penelitian relevan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti konteks ini dengan judul "**Determinan Rasio Keuangan dan *Good Corporate Governance* di Badan Usaha Milik Negara**".

## **I.2. Perumusan Masalah**

Lucky Monic Sabatini, 2021

**DETERMINAN RASIO KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, didapatkan perumusan masalah yang dibahas oleh peneliti yaitu:

1. Apakah ada pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan BUMN?
2. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap profitabilitas perusahaan BUMN?
3. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan BUMN?
4. Apakah ada pengaruh dewan direksi terhadap profitabilitas perusahaan BUMN?
5. Apakah ada pengaruh komite audit terhadap profitabilitas perusahaan BUMN?

### **I.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, tujuan penulisan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.
2. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.
3. Mengetahui pengaruh komisaris independen terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.
4. Mengetahui pengaruh dewan direksi terhadap terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.
5. Mengetahui pengaruh komite audit terhadap profitabilitas perusahaan BUMN.

### **I.4. Manfaat Hasil Penelitian**

Diperoleh beberapa manfaat dari penelitian ini untuk pihak-pihak terkait yang dijelaskan sebagai berikut:

#### **1. Aspek Teoritis**

Informasi pada penelitian ini diharapkan relevan bagi akademisi, sehingga dapat menyumbangkan wawasan dan pengetahuan sebagai dasar perluasan untuk penelitian selanjutnya tentang profitabilitas.

#### **2. Aspek Praktis**

##### **a. Bagi Perusahaan**

Lucky Monic Sabatini, 2021

**DETERMINAN RASIO KEUANGAN DAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DI BADAN USAHA MILIK NEGARA**

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi bagi perusahaan atau lembaga terkait untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan sebelum mengambil keputusan dalam rangka perencanaan kerja dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan di masa mendatang.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk calon investor sebelum berinvestasi atau menanamkan modalnya pada perusahaan BUMN yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia (BEI).